



**KONSEP SYURA' DALAM AL-QUR'AN
(ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES)**
<https://doi.org/10.53649/contemplate.v4i1.242>

Nafisah Innayati^{1*}, Fikru Jayyid Husain²

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 1naphis48@gmail.com, 2fikrujayyid@gmail.com

Abstract

This paper discusses the concept of shura or deliberation in the Qur'an. In the contemporary era, shura is often associated with several modern political theories, such as the democratic system. That will reduce the meaning of shura and democracy. This paper will discuss whether the concept of shura, as a state institution and institution in modern times, can be integrated with a democratic system. To answer these problems, the writer uses a linguistic approach as a tool for analysis, that is semiotics approach. The term shura is a symbol or sign of conveying a message that must be interpreted. One of the semiotic theories is the approach offered by Roland Barthes. There are two stages in Barthes' semiotic theory. The first stage is the linguistic system or denotative meaning and the second stage is the mythological system or connotative meaning. The results obtained from this study are: first, in the linguistic system or denotation meaning of the word shura/deliberation has the meaning of taking opinions (opinions), negotiations, and deliberations that aim to reach a joint decision. Second, the mythological system or connotative meaning, the word shura/deliberation in this system is often referred to as democracy because the two concepts have something in common, namely to realize a government based on justice in accordance with joint decisions. However, equating the two terms as one unit in the sense of synonymity is not the right thing, because in addition to having similarities, shura and democracy also have very significant differences.

Keywords: Shura, Semiotics, Roland Barthes



Abstrak

Tulisan ini membahas tentang konsep syura' atau musyawarah yang terdapat di Al-Qur'an. Di era kontemporer, beberapa teori politik yang bersifat modern sering dikaitkan dengan konsep syura', diantaranya sistem demokrasi. Hal tersebut tentunya akan mereduksi makna dari syura' dan demokrasi. Tulisan ini akan mendiskusikan apakah konsep syura', yang merupakan sistem pemerintahan Islam serta Lembaga sekaligus pranata kenegaraan dapat diintegrasikan dengan sistem demokrasi di zaman modern ini. Untuk menjawab problematika tersebut, penulis menggunakan pendekatan kebahasaan sebagai pisau analisisnya, yaitu pendekatan semiotika. Istilah syura' merupakan simbol atau tanda dari pesan yang hendak disampaikan dan mengharuskan adanya interpretasi. Penulis menggunakan pendekatan semiotika yang ditawarkan oleh Roland Barthes. Terdapat dua tahapan dalam teori semiotika Barthes yaitu sistem linguistik (makna denotasi) dan sistem mitologi (makna konotasi). Penerapan semiotika Barthes menghasilkan kesimpulan bahwa pertama, pada sistem linguistik atau makna denotasi kata syura' / musyawarah memiliki makna mengambil madu (pendapat), perundingan, dan perembukan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keputusan bersama. Kedua, sistem mitologi atau makna konotasi, kata syura' / musyawarah dalam sistem ini sering di sebut sebagai demokrasi karena kedua konsep tersebut memiliki kesamaan yaitu untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berasaskan keadilan sesuai dengan keputusan bersama. Akan tetapi menyamakan kedua istilah tersebut sebagai satu kesatuan dalam arti sinonimitas bukanlah hal yang tepat, karena selain memiliki kesamaan, syura' dan demokrasi juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

Kata Kunci: Syura'; Semiotika; Roland Barthes



A. PENDAHULUAN

Syura' atau musyawarah merupakan term dalam Al-Qur'an yang mengalami evolusi pemaknaan. Di era kontemporer ini, istilah syura' diperdebatkan oleh para cendekiawan muslim. Tidak sedikit para sarjana muslim yang menganggap bahwa syura' atau musyawarah merupakan istilah klasik yang berevolusi menjadi demokrasi di era modern. Pandangan tersebut secara tidak langsung akan mereduksi makna dari syura' dan demokrasi. Cendekiawan muslim pemikir neomodernis, Fazlur Rahman, dalam tulisannya yang berjudul "*A recent Controversy over the Interpretation of Syura'*", memaparkan bahwa perbincangan terkait relasi antara konsep musyawarah dan konsep ilmu politik modern dimulai sejak pertengahan abad ke-19, yang pada saat itu dunia Islam mulai dimasuki teori politik yang berasal dari barat. Rahman mengklasifikasikan pembahasan tersebut menjadi dua kudu. *Pertama*, paham demokrasi-populis. *Kedua*, paham elitis-royalis (Rahman, 1981). Selain itu, M. Dawam Rahardjo dalam bukunya Ensiklopedi Al-Qur'an, mengutip pendapat dari Bernard Lewis dalam bukunya yang berjudul *Mesveret* (terbit di Istanbul, 1982), bahwa seorang pemikir Turki yang bernama Namik Kemal dianggap sebagai orang pertama yang menginterpretasikan musyawarah dalam Al-Qur'an sebagai representatif dari konsep pemerintahan lewat tulisan artikelnya yang membahas seputar konsep syura' dalam Al-Qur'an. Meskipun tulisan Namik Kemal berkonteks kesultanan utsmaniyah, tetapi pemikirannya dapat dinilai sebagai pemikiran yang paling orisinal dari pemikiran demokrasi populis hingga saat ini (Rahardjo, 2002).

Pembahasan terkait istilah syura' terdapat di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. Āli 'Imrān [3]: 159, dan QS. Asy-Syura' [42]: 38. Pada QS. Al-Baqarah [2]: 233, istilah syura' memiliki konteks yang berkaitan dengan urusan keluarga sedangkan dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 159 dan QS. Asy-Syūrā [42]: 38, para cendekiawan muslim berpendapat bahwa kedua surat tersebut dapat digunakan sebagai landasan normatif dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan. Untuk itu, pembahasan dalam artikel ini memfokuskan pada dua surat terakhir yang memiliki relevansi terhadap sistem pemerintahan. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan linguistik sebagai pisau analisis, yaitu semiotika Roland Barthes guna mengungkap makna syura' atau musyawarah. Semiotika yang ditawarkan oleh Barthes memiliki metode analisis struktural yang jelas dalam kritik teks termasuk diantaranya kritik teks dalam Al-Qur'an. Selain itu, Barthes juga memiliki fokus terhadap pemaknaan denotasi sebagai signifikan tingkat pertama dan konotasi sebagai tingkat



kedua. Dengan demikian, tujuan dari penggunaan pendekatan ini sebagai kacamata analisis adalah untuk mengungkap berbagai tanda yang terdapat dalam sebuah teks maupun non teks yang dalam tulisan ini penulis akan fokus terhadap term syura' sebagai suatu tanda yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Diskusi yang membahas seputar term syura' telah dilakukan sebelumnya. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis mengklasifikasikannya kedalam beberapa kategori, *pertama*, pembahasan term syura' menurut beberapa pakar tafsir (Malik & Drs. M. Darajat Ariyanto, 2019; Muttaqin & Apriadi, 2020; Saputro, 2016). *Kedua*, korelasi syura' dengan demokrasi (Hidayat, 2015; Ma'ruf, 2020). *Ketiga*, konsep syura' dalam Al-Qur'an (Bakry, 2017; Rusdi, 2014). *Keempat*, analisis term syura' menggunakan pendekatan linguistik (Maftuh, 2019; Muhammad Dzilfikri Al Baihaqi, 2022). Dari beberapa kecenderungan dalam penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya dalam mendekati term syura' dari segi linguistik. Karena penelitian sebelumnya juga menggunakan pendekatan linguistik, yaitu teori semantik yang di populerkan oleh Toshihiko Izutsu dan juga pendekatan ma'nā cum maghẓā, jadi dalam mengkaji makna syura' dalam penelitian ini menggunakan semiotika dari Roland Barthes.

Penulis berharap tulisan ini dapat menambah khazanah pengetahuan terkait penafsiran atas Al-Qur'an dan juga dapat memperkaya paradigma khususnya didalam kajian *Qur'anic Studies*. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkap pesan yang tersembunyi dalam suatu tanda dibalik term syura' atau musyawarah sehingga nantinya dapat mengetahui konsep serta ideologi-ideologi yang dibangun melalui pendekatan semiotika Roland Barthes. Penelitian ini berangkat dari beberapa asumsi yang muncul seperti konsep syura' atau musyawarah yang sering dilakukan Nabi Muhammad dalam beberapa hal seperti dalam memimpin Madinah, sama atau relevan dengan beberapa teori politik modern seperti demokrasi, republik, parlemen dan lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif karena bersumber dari beberapa literatur pustaka dalam menggali data. Penelitian ini dimulai dengan penyusunan asumsi dasar serta kerangka berfikir yang akan digunakan. Setelah itu, asumsi dasar beserta kerangka berfikir yang telah disusun tersebut diaplikasikan secara sistematis didalam proses pengumpulan dan pengolahan data guna memberikan deskripsi serta argumentasi (Arni, 2013). Data yang diperoleh dari beberapa



literatur tersebut kemudian diolah dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan data secara lengkap serta dianalisis sehingga akan menghasilkan kajian penelitian yang komprehensif. Kemudian dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan semiotika dari Roland Barthes.

C. HASIL DAN ANALISIS

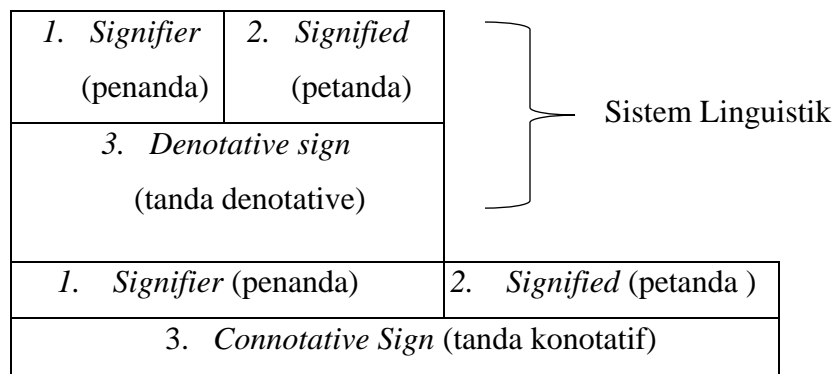
1. Teori Semiotika Roland Barthes

Roland Barthes lahir di daerah Cherbough, Manche Prancis pada tahun 1915 (Kumalasari, 2021). Barthes merupakan ahli semiotika yang mengembangkan teori sebelumnya yaitu teori strukturalisme Ferdinand De Saussure. Dalam penelitian semiotikanya, Barthes menawarkan konsep konotasi dan denotasi sebagai pisau analisis dimana kedua konsep tersebut merupakan dua level petanda yang akan menghasilkan sebuah makna. Konsep denotasi yang menggambarkan relasi antara *signifier* (ekspresi) dan *signified* (content) dalam suatu tanda terhadap realitas eksternal masuk kedalam signifikansi tahap pertama. Jadi makna nyata dari sebuah tanda adalah denotasi. Kemudian signifikansi tahap kedua ditunjukkan oleh makna konotasi yang menggambarkan adanya relasi yang terbangun ketika terjadi pertemuan antara tanda dengan emosi atau perasaan *reader* beserta nilai-nilai kebudayaannya. Jadi makna konotasi bisa disebut memilikisifat subjektif atau intersubjektif (Wibowo, 2013). Singkatnya denotasi merupakan gambaran dari suatu tanda terhadap sebuah objek, sedangkan makna konotasi adalah bagaimana cara menggambarkannya.

Sifatnya yang terkesan subjektif membuat makna konotasi terkadang tidak disadari kehadirannya, bahkan tidak sedikit pembaca yang mengklaim makna konotatif sebagai makna denotatif. Maka dari itu analisis semiotika memiliki tujuan salah satunya adalah menyediakan suatu kerangka berpikir dan metode analisis untuk menanggulangi adanya kesalahan dalam membaca tanda atau kesalahan dalam menginterpretasikan suatu tanda. Pada signifikansi tahap kedua, tanda bekerja melalui mitos. Pengertian mitos disini berbeda dengan pengertian mitos yang dikenal di Indonesia, yaitu sebuah kisah cerita rakyat yang menampilkan suatu makhluk yang dianggap suci dalam bentuk yang konkret dan diyakini keberadaannya. Menurut Barthes, mitos adalah sebuah sistem dalam komunikasi, mengingat fungsi mitos adalah sebagai penyampai pesan (Zainar, 2008). Mitos adalah bagaimana aspek realitas atau gejala alam dipahami serta dijelaskan oleh suatu kebudayaan. Selain itu, mitos juga merupakan produk kelas sosial yang mempunyai suatu dominasi.



Contohnya, mitos primitif berkaitan dengan pembahasan tentang hidup dan mati, manusia dan dewa. Sedangkan mitos kontemporer berkaitan dengan pembahasan seputar femininitas, maskulinitas, ilmu pengetahuan, dan kesuksesan. Mitos merupakan suatu wahana terwujudnya sebuah ideologi (Wibowo, 2013).



Gambar Konsep Semiologi Roland Barthes

2. Semiotika dalam Menafsirkan Al-Qur'an

Semiotika merupakan disiplin kelimuan yang mengkaji secara mendalam segala hal yang berkaitan dengan tanda, baik itu sistem tanda maupun konsep dari tanda. Ruang lingkup suatu tanda sangatlah luas, dimulai dari bahasa, lukisan, musik, film, bentuk-bentuk pakaian dan lainnya, bahkan juga termasuk dunia itu sendiri (Thalib, 2018). Dalam hal ini, Al-Qur'an merupakan salah satu objek yang bisa dikaji dengan menggunakan analisis semiotika. Karena wahyu Tuhan ini telah masuk kedalam wilayah historis, yakni penggunaan bahasa manusia (bahasa Arab) sebagai kode komunikasi yang digunakan Tuhan dengan Rasul-Nya. Jadi penerapan semiotika dalam Al-Qur'an yakni pengkajian secara mendalam tanda-tanda beserta konvensi-konvensi yang menyertainya yang terdapat didalam Al-Qur'an (Imron, 2011). Muhammad Arkoun, seorang pemikir Islam kontemporer, mendefinisikan Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan yang disampaikan kepada manusia yang mengandung pemaknaan atau penandaan. Jadi dalam ayat Al-Qur'an, mengandung unsur-unsur seperti tanda (*sign*), lambang (*symbol*) serta sinyal (*signal*). Dan jika dilihat dari segi harfiah, term ayat memiliki makna "tanda -tanda". Jadi, dalam membaca ayat Al-Qur'an dibutuhkan pengetahuan yang berkaitan dengan kode, sehingga produksi makna dalam setiap ayat dapat terjadi secara luas. Nasr Hamid Abu Zaid juga berargumen bahwa satuan-satuan dasar yang dimiliki Al-Qur'an disebut ayat (tanda).

Kajian semiotika sebagai pisau analisis terhadap Al-Qur'an berupaya untuk membaca setiap teks dalam perbedaannya masing-masing. Perbedaan tersebut bukan berarti melihat teks dari sisi ke individualitasnya, akan tetapi kajian semiotika melihat teks sebagai tanda yang berada dalam suatu jaringan yang berbeda dan hal tersebut merupakan suatu infinitas tertinggi dalam kajian bahasa. Menurut Barthes, analisis semacam itu tidak lagi mempertanyakan darimana datangnya teks dan bagaimana terbentuknya suatu teks, akan tetapi mencoba untuk mengungkap bagaimana suatu teks terbungkus, meledak dan menyebar melalui perantara kode (Thalib, 2018). Disini, penanda Al-Qur'an (*signifier*) berwujud teks atau ayat Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Hal tersebut mencakup setiap huruf, kata, ayat, surat maupun relasi yang terjadi diantara masing-masing unsur (munasabah). Sedangkan petanda Al-Qur'an (*signified*) merupakan konsep yang tersembunyi dibalik penanda Al-Qur'an (aspek mental). Dalam hal ini, konvensi yang melingkupi teks Al-Qur'an menentukan terjadinya relasi antara penanda dan petanda dari Al-Qur'an (Imron, 2011).

3. Term *Syura'* dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, pembahasan terkait konsep *syura'* terdapat didalam tiga tempat, yaitu pada QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. Āli 'Imrān [3]: 159, dan QS. Asy-Syura' [42]: 38. Akan tetapi penulis akan membatasi tulisan ini dengan fokus terhadap dua surat terakhir yang dijadikan oleh mayoritas cendekiawan muslim sebagai landasan dari teori pemerintahan. Yang pertama, istilah musyawarah berasal dari kata kerja *syāwara-yusyāwiru* yang terdapat di QS. Āli 'Imrān [3]: 159. Kedua, istilah *syura'* berasal dari kata *syāwara-yasyūru* yang terdapat dalam QS. Asy-Syura' [42]: 38.

a. QS. Āli 'Imrān [3]: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka karena rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau berlaku keras serta berhati kasar, pastilah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan



mereka dalam urusan itu. Lalu, apabila engkau sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Ayat tersebut turun di Madinah -dimana masyarakat muslim sudah terbentuk- pada masa perang uhud. Jika dilihat dari segi tekstual, ayat tersebut secara khusus memerintahkan Nabi Muhammad agar me-musyawarah-kan setiap perkara dengan sahabat atau masyarakatnya. Selain itu, ayat ini secara implisit juga merupakan petunjuk bagi setiap muslim- terkhusus pemimpin- untuk selalu bermusyawarah terhadap segala sesuatu dengan para anggotanya (Shihab, 1996). Para ahli tafsir sering menggunakan ayat ini sebagai dasar atau prinsip kemasyarakatan dan kenegaraan.

b. QS. Asy-Syura' [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ؕ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) panggilan Tuhan dan melakukan salat, sedang persoalan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat ini turun di Makkah, ketika permusuhan yang terjadi di antara masyarakat Makkah sedang memuncak dan mengharuskan sebagian sahabat harus berhijrah ke Abesinia untuk memperoleh keselamatan. Selain itu, ayat ini juga sebagai pujian untuk golongan Anshar yang telah membela Nabi Muhammad Saw serta melakukan musyawarah untuk menentukan kesepakatan di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. Jika dilihat dari segi tekstual, bunyi ayat tersebut tidak langsung ditujukan kepada Nabi, tetapi ditujukan kepada kaum muslim (Shihab, 1996).

Dalam ensiklopedia Al-Qur'an karya M. Dawam Rahardjo, beliau menjelaskan adanya dua hubungan yang terjadi didalam dua surat diatas, *pertama* hubungan vertikal antara Nabi dan sahabatnya, yang terjadi didalam QS. Āli 'Imrān [3]: 159. Sepintas, inisiatif adanya musyawarah seperti ini berasal dari atas (vertikal). Namun, jika kita melihat istilah musyawarah dari asal katanya *wa-syāwir-hum*, mengandung konotasi “saling” atau “berinteraksi” antara yang diatas dan yang dibawah. Kedua, hubungan horizontal. Hal tersebut bisa dilihat dari istilah *syura'* yang berasal dari kata *wa amru hum syura' bayna hum* yang mengandung konotasi berasal dari suatu pihak tertentu, akan tetapi rangkaian kalimatnya mengisyaratkan makna “bermusyawarah diantara mereka” atau



“diantara mereka perlu ada (lembaga) syura’. Karena hal tersebutlah, istilah syura’ diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” (Rahardjo, 2002)

4. Konsep Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan

Demokrasi merupakan istilah yang diciptakan oleh sejarawan Yunani, herodotus pada abad ke-5 SM. Istilah demokrasi lahir dari akar kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuatan atau kekuasaan). Jadi secara etimologi, demokrasi memiliki arti kekuasaan rakyat (H. Darmawati, 2013). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata demokrasi memiliki arti bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh rakyatnya dalam memerintah, serta mengutamakan gagasan terkait persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat (*Hasil Pencarian - KBBI Daring*, n.d.). Demokrasi menurut istilah adalah sebuah gagasan dan prinsip terkait kebebasan tetapi tetap memiliki ruang lingkup bangunan prosedur yang melewati sejarah panjang dan berliku. Jadi demokrasi merupakan konsep pelembagaan dan kebebasan (H. Darmawati, 2013).

Prinsip demokrasi selalu mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengambilan keputusan seputar persoalan kenegaraan serta kepentingan Bersama. Jadi jika suatu negara menganut sistem demokrasi, maka pemerintahan yang dijalankan harus berdasarkan kehendak serta kemauan rakyat. Tiga aspek penting yang terkandung didalam konsep demokrasi menurut Mahfud MD yaitu, *pertama* pemerintahan dari rakyat (*Government of the people*). *Kedua*, pemerintahan oleh rakyat (*Government by people*). *Ketiga*, pemerintahan untuk rakyat (*Government for people*) (Mahfud MD, 1999).

5. Aplikasi Semiotika Roland Barthes pada term Syura’ dalam Al-Qur’an

a. Sistem Linguistik

Langkah pertama dari analisis semiotika Roland Barthes adalah menggali makna denotasi, atau sistem linguistik. Dalam analisis ini, suatu kata akan dilihat dari kacamata tekstual. Kata syura’ berasal dari akar kata *syāra-yasyūru-syauran* yang memiliki makna melatih atau mengambil madu. Sedangkan *asy syura’* atau *al-masyūrah* memiliki arti saran, nasihat, serta pertimbangan (Munawwir, 2002). Kata syura’, dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan berasal dari kata *syaur* yang memiliki makna mengambil serta mengeluarkan pendapat yang paling baik dengan cara mempertemukan satu pendapat dengan pendapat lainnya (Shihab, 2006b).



Sedangkan syura' yang berakar kata *syāwara-yusyāwiru-musyāwaratan*, bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna tersebut mengalami perkembangan sehingga cakupannya semakin luas, yaitu segala perkara yang dapat diambil/dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Pada dasarnya, musyawarah hanya difungsikan untuk perkara yang baik. Madu tidak hanya memiliki rasa manis saja, tetapi juga memiliki banyak khasiat bagi manusia, yaitu sebagai obat dari berbagai penyakit, dan sekaligus menjadi sumber kekuatan dan kesehatan. Nabi menyamakan manusia yang melangsungkan musyawarah dengan lebah, karena madu dihasilkan oleh lebah. Selain itu, lebah juga merupakan makhluk yang sangat disiplin, memiliki hubungan kerjasama yang bagus dengan sesamanya, memakan sari kembang yang menghasilkan madu, tidak pernah merusak apapun yang ia hinggapi, tidak pernah mengganggu kecuali sebelumnya telah diganggu, dan sengatannya bisa dijadikan sebagai obat (Shihab, 2006a).

Dalam *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, kata syura' memiliki dua arti, yakni memperlihatkan dan memaparkan perkara atau mengambil sesuatu (Abu al-Husain, 1979). Sedangkan dalam *al-Mufradat fī Gharīb al-Qur'an* karya Raghib al-Asfahani, syura' adalah suatu proses mengeluarkan pendapat dengan saling memperbaiki antar peserta yang lain (Al-Asfahaniy, 2017).

b. Sistem Mitologi

Tahap selanjutnya yaitu signifikansi tingkat kedua, yaitu sistem mitologi. Dalam tahap ini, dipaparkan hubungan antara penanda dan petanda yang memiliki sifat implisit serta mengoprasikan makna secara tidak langsung dan tidak pasti sehingga membuka terjadinya berbagai makna yang lahir. Musyawarah yang diperintahkan dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 159, terjadi setelah Nabi dan kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang uhud. Ayat ini juga turun pasca hijrahnya Nabi ke Madinah, yang mana sistem kemasyarakatan sudah mulai terbentuk dengan Nabi yang menjadi pemimpin atau kepala negara. Meski demikian, dalam kenyataannya Nabi sudah berkali-kali menerapkan musyawarah dalam menghadapi persoalan bersama. Hal tersebut juga terlihat ketika beliau mengajak kaum muhajirin untuk bermusyawarah sebelum perang badar. Ketika semuanya sudah mufakat, beliau kemudian mengajak kaum anshar untuk bermusyawarah. Dan ketika dua kaum tersebut sudah bersepakat dengan satu pendapat yang mufakat, barulah perang beliau teruskan.



QS. Āli ‘Imrān [3]: 159, yang sebelumnya didahului oleh QS. Asy-Syura’ [42]: 38 terkait konsep musyawarah, menjelaskan bahwa syura’ atau musyawarah menjadi acuan dasar untuk membangun masyarakat dan negara Islam. Selain itu syura’ atau musyawarah juga menjadi dasar dalam berpolitik dalam pemerintahan dan dalam memimpin negara. Meski demikian, Rasulullah tidak berwasiat terkait politik perihal tata cara dalam pengaplikasian syura’ ini. Buya Hamka dalam kitab tafsirnya memaparkan bahwa Rasulullah tidak akan mengikat umatnya dengan satu aturan yang jelas tidak akan relevan dengan zaman yang selalu berkembang. Jadi diperbolehkan untuk melakukan ijtihad dengan cara apapun dan juga diperbolehkan untuk mengadakan musyawarah dan mengambil keputusan yang pada zaman sekarang disebut prosedur siding (Hamka, 2015). Perwujudan terkait konsep sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai keadilan sudah ada jauh sebelum datangnya Islam. Di Yunani dan Romawi, telah dikenal gagasan tentang demokrasi atau pemerintahan republik dalam rangka penolakan terhadap sistem tirani dan bentuk perlawanan terhadap despotisme Timur oleh imperium Parsi. Meskipun dalam penentuan pemimpin, cara serta proses pemutusan perkara dalam sistem pemerintahan republik berbeda-beda, namun yang menjadi inti pokok adalah bahwa seorang penguasa tertinggi atau pemegang pemerintahan tidak bersifat turun-temurun, tetapi dipilih langsung oleh rakyatnya baik secara langsung maupun tidak langsung (Rahardjo, 2002).

Dalam buku Republik karya Plato, menjelaskan terkait gagasan sebuah pemerintahan yang adil, dipimpin oleh orang yang bijaksana serta sesuai dengan kepentingan mereka yang diperintah. Contoh konkret dari sistem demokrasi (dari bahasa Yunani, *demos*: rakyat, *kratein*: pemerintahan) yang dikenal oleh sejarah terjadi pada abad ke-6 dan 5 SM, yaitu Republik Athena. Sistem yang dimiliki republik Athena menggambarkan sistem musyawarah untuk membuat undang-undang yang dilakukan oleh rakyat dan memiliki pimpinan pemerintahan, walaupun yang diakui sebagai *demos* pada waktu itu hanyalah penduduk yang merdeka dan bukan budak (Rahardjo, 2002). Kegiatan musyawarah juga bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Makkah, hal tersebut bisa dilihat ketika penyelenggaraan musyawarah (*dar al-nadwah*) yang beranggotakan para pemuka kabilah di rumah Qusay ibn Kilab. Kegiatan tasyawwur juga sudah biasa terjadi dikalangan orang-orang kaya yang cendekia nan bijak. Jika dilihat dari aspek tersebut, Al-Qur’an sejatinya adalah legitimasi terhadap tradisi yang sudah ada dan dianggap baik, tetapi diberi makna baru, seperti istilah taqwa yang sudah dikenal dikalangan jahiliyyah.



Berikut adalah tabel penerapan konsep semiotika Roland Barthes terhadap syura' /musyawarah:

1. Signifier (Penanda I) Syura' /Musyawarah	2. Signified (Petanda I) Mengambil madu (pendapat) perundingan, perembukan,	LINGUISTIK
3. TANDA I (Penanda II) Syura' /Musyawarah dalam sistem pemerintahan	(Petanda II) Demokrasi	MITOLOGI
TANDA II Sistem pemerintahan yang berasaskan keadilan sebagai bentuk penolakan terhadap sistem pemerintahan yang monarki		

Berdasarkan tabel diatas, penerapan semiotika Roland Barthes terhadap konsep syura'/musyawarah dapat disimpulkan bahwa signifikansi tahap pertama yaitu kajian linguistik kata syura' memiliki makna denotasi mengambil madu atau pendapat, perundingan, dan perembukan. Proses pengambilan suatu pendapat yang dengan tujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan berdasarkan keadilan dan keputusan bersama. Kemudian tahapan kedua yaitu sistem mitologi, makna konotasi yang didapatkan adalah sistem pemerintahan yang berasaskan keadilan sebagai bentuk penolakan terhadap sistem pemerintahan yang monarki. Dan dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang berasaskan keadilan, kata syura'/musyawarah yang menjadi sistem pemerintahan Islam ini memiliki hubungan atau keterkaitan dengan sistem demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan dalam suatu negara yang berlandaskan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat sebagai bentuk penolakan terhadap sistem pemerintahan monarki.

6. Relevansi konsep syura dengan sistem demokrasi



Terkait integrasi antara syura' dan demokrasi, disini penulis akan memaparkan beberapa pendapat dari para cendekiawan, diantaranya:

1. Al-Hasjimy, mengatakan bahwa konsep syura' dapat ditafsirkan sebagai demokrasi namun tidak identik seluruhnya. Konsep demokratis yang dijalankan dalam pemerintahan republik memang telah meneladani para sahabat namun teladan yang dimaksud mencakup beragam variasi dalam pengaplikasiannya (H. Darmawati, 2013).
2. Menurut Aat Hidayat, istilah syura' lebih sempit daripada demokrasi. Hal tersebut mengacu kepada beberapa pendapat intelektual terkait keselarasan antara syura' dan demokrasi terletak pada beberapa prinsip demokrasi, yaitu keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), kemerdekaan (*al-hurriyyah*), musyawarah (*asy-syura'*), dan pertanggung jawaban (*al-mas'uliyah*). Jadi, syura' hanyalah bagian kecil dari sistem demokrasi yang lebih luas (Hidayat, 2015).
3. Menurut Kasman Bakry, membandingkan antara syura' dengan demokrasi tidaklah tepat, karena syura' berarti meminta pendapat (*talab al-ra'yi*), yaitu suatu mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam dan merupakan bagian dari proses sistem pemerintahan Islam (*nizam al-siyasah al-Islamiyyah*). Sedangkan demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem pemerintahan, sehingga bukan sekedar proses pengambilan pendapat saja. Jadi yang lebih tepat adalah ketika membandingkan antara sistem pemerintahan Islam dengan demokrasi itu sendiri (Bakry, 2017).

Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Wawasan Tafsir Al- Qur'an, memaparkan apabila kita bermaksud untuk membandingkan antara syura' dengan demokrasi, tentunya kita perlu menjelaskan apa yang disebut dengan demokrasi. Akan tetapi agar tidak memasuki rincian terkait makna demokrasi yang beraneka ragam, dapat diketahui bahwa manusia telah mengenal tiga cara untuk menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Keputusan yang ditetapkan oleh penguasa
2. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan minoritas
3. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas, dan ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi



Bentuk pertama, sangat tidak sesuai dengan syura' yang di terapkan dalam Islam. Begitupun dengan bentuk kedua, karna jika cermati apakah keistimewaan dari pendapat minoritas yang mengalahkan pandangan mayoritas? Memang terdapat sebagian pakar Islam kontemporer yang menolak kewenangan mayoritas dengan merujuk pada firman Allah QS Al-Mā'idah [5]: 100, "*Tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menyenangkan kamu*", juga dalam QS. Az-Zukhruf [43]: 78, "*Kebanyakan kamu tidak menyenangi kebenaran*". Akan tetapi pandangan dari mereka tersebut sulit untuk diterima, dengan alasan konteks dari ayat-ayat tersebut bukan berbicara tentang musyawarah, tetapi tentang petunjuk ilahi yang diberikan kepada para nabi dan ditolak oleh sebagian umatnya pada waktu itu. Meskipun didalam agama, Islam membenarkan pendapat dari mayoritas, tetapi menurut beberapa pakar keputusan mayoritas tersebut tidak mutlak, seperti yang dipaparkan oleh pakar muslim Mesir kontemporer, Dr. Ahmad Kamal Abu Al-Majad dalam bukunya *Hiwar La Muwayahah* (Dialog bukanlah Konfrontasi). Mungkin maksud dari tidak mutlak adalah bahwa keputusan janganlah langsung diambil berdasarkan pandangan mayoritas hanya setelah dilakukan sekali dua kali musyawarah, tetapi hendaknya dilakukan secara berulang-ulang hingga diperoleh kesepakatan.

Dalam pelaksanaannya, syura' dilakukan oleh orang-orang pilihan yang memiliki sifat terpuji serta tidak memiliki kepentingan pribadi atau golongan dan dilakukan sewajarnya agar disepakati bersama. Dan jika diantara anggota ada yang tidak menerima keputusan, hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya sisi-sisi yang kurang berkenan dihati dan pikiran orang-orang pilihan walaupun mereka minoritas, sehingga perlu ditinjau ulang atau perlu dibicarakan lebih lanjut guna mencapai suatu mufakat (untuk menemukan madu yang terbaik). Hal ini juga merupakan faktor yang membedakan antara syura' didalam Islam dengan demokrasi secara umum.

Perbedaan selanjutnya antara syura' dengan demokrasi terjadi dalam kasus pengangkatan seorang pemimpin. Dalam Islam, syura' mengaitkan dengan "perjanjian ilahi", seperti ketika Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam yang diceritakan dalam Al-Qur'an:

Allah berfirman, "sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam (pemimpin) bagi manusia." Ibrahim berkata, "Saya bermohon agar pengangkatan ini dianugerahkan juga kepada sebagian keturunanku." Dia (Allah) berfirman, "perjanjian-Ku tidak menyentuh orang-orang yang zalim." (QS. Al-Baqarah [2]: 124).



Perbedaan yang terakhir yaitu, dalam demokrasi sekuler, persoalan apapun dapat dibahas dan diputuskan, sedangkan syura' dalam agama Islam menjelaskan bahwa tidak semua hal bisa dimusyawarahkan. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan secara tegas dan pasti tidak bisa diganggu gugat dengan keputusan manusia. Islam juga melarang untuk menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran ilahi (Shihab, 1996). Dengan demikian, dari beberapa pendapat terkait relevansi konsep syura' dengan demokrasi, anggapan bahwa kedua konsep tersebut adalah sinonim kuranglah tepat, karena masing-masing dari keduanya memiliki perbedaan yang signifikan.

D. KESIMPULAN

Penerapan semiotika Roland Barthes terhadap konsep syura'/musyawarah dapat disimpulkan bahwa signifikansi tahap pertama yaitu kajian linguistik kata syura' memiliki makna denotasi mengambil madu atau pendapat, perundingan, dan perembukan. Proses pengambilan suatu pendapat yang dengan tujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan berdasarkan keadilan dan keputusan bersama. Kemudian tahapan kedua yaitu sistem mitologi, makna konotasi yang didapatkan adalah sistem pemerintahan yang berasaskan keadilan sebagai bentuk penolakan terhadap sistem pemerintahan yang monarki. Dan dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang berasaskan keadilan, kata syura'/musyawarah yang menjadi sistem pemerintahan Islam ini memiliki hubungan atau keterkaitan dengan sistem demokrasi yang merupakan sistem pemerintahan dalam suatu negara yang berlandaskan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat sebagai bentuk penolakan terhadap sistem pemerintahan monarki. Meski demikian, menyamakan kedua konsep antara syura dengan demokrasi kuranglah tepat, karena masing-masing dari keduanya memiliki perbedaan yang signifikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain, A. ibn F. ibn Z. (1979). *Mu'jam Maqayis al-Lughah Juz III*. Dar al-Fikr.
- Al-Asfahaniy, A.-R. (2017). Al-Mufradat Fi Garibil Quran (Kamus Al-Qur'an) Jilid 2. In R. Nurhadi (Ed.), *Jilid 2*. Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Arni, J. (2013). *Metode Penelitian Tafsir*. Daulat Riau.
- Bakry, K. (2017). Konsep Syura dalam Al-Qur'an. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 3(1), 42–49.
- H. Darmawati. (2013). *Demokrasi dalam Islam Suatu Tinjauan Fikih Siyash* (K. Salenda, Ed.). Alauddin University Press.
- Hamka. (2015). *Tafsir al-Azhar jilid 2 (juz 4,5,6)*. 1–770.
- Hasil Pencarian—KBBI Daring*. (n.d.). Retrieved May 30, 2023, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/demokrasi>
- Hidayat, A. (2015). Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an. *Addin*, 9(2), 401–420.
- Imron, A. (2011). *Semiotika Al-Qur'an Metode dan Aplikasi terhadap Kisah Yusuf* (A. R. Adnan, Ed.). Teras.
- Kumalasari, A. M. (2021). Makna Qiradah dalam Kisah Bani Israil. *Jurnal Al-Fanar*, 4(2), 167–176. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v4n2.167-176>
- Maftuh, M. (2019). *Konsep Syura Dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik Toshihiko Izutsu*. IAIN Purwokerto.
- Mahfud MD, M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gema Media.
- Malik, J., & Drs. M. Darajat Ariyanto, M. A. (2019). *Konsep Syura dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi)* [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://doi.org/10/SURAT%20PERNYATAAN.pdf>
- Ma'ruf, A. H. (2020). *SYÛRÂ DALAM AL-QURÂN DAN INTEGRASINYA DENGAN DEMOKRASI: Studi Tafsir Klasik dan Kontemporer Mengenai Surat Ali-'Imrân : 159* [MasterThesis]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51542>
- Muhammad Dzilfikri Al Baihaqi, N. : 18105030037. (2022). *Konsep Syura dalam Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Sistem Demokrasi di Indonesia (Interpretasi QS. Ali Imran: 159 dengan Pendekatan Ma'na-cum-Maghza)* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54021/>



-
- Munawwir, A. W. (2002). *KAMUS AL-MUNAWWIR ARAB-INDONESIA TERLENGKAP*. Pustaka Progressif.
- Muttaqin, J., & Apriadi, A. (2020). SYURA ATAU MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan*, 1(2), Article 2.
- Rahardjo, D. (2002). *ENSIKLOPEDI AL-QUR'AN Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (B. M. Rachman, Ed.; 2nd ed.). PARAMADINA.
- Rahman, F. (1981). A Recent Controversy over the Interpretation of "Shūrā." *History of Religions*, 20(4), 291–301.
- Rusdi, M. A. (2014). WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG MUSYAWARAH. *Jurnal Tafser*, 2(1), Article 1. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7458>
- Saputro, A. H. (2016). KONSEP SYURA MENURUT HAMKA DAN M. QURAIISH SHIHAB. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1144>
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Issue November). Mizan.
- Shihab, M. Q. (2006a). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an jilid 2*. Lentera hati.
- Shihab, M. Q. (2006b). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an jilid 12*. Lentera hati.
- Thalib, A. A. (2018). *Fisafat Hermeneutika dan Semiotika*. LPP. Mitra Edukasi.
- Wibowo, I. seto wahyu. (2013). *Semiotika Komunikasi* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Zainar, O. K. S. (2008). *Semiotik dan Penerapannya dalam karya sastra*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.